

**FAKTOR-FAKTOR DALAM ASPEK MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI



**SASKIA
105721104620**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**FAKTOR-FAKTOR DALAM ASPEK MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**SASKIA
NIM: 105721104620**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar S1
Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar***

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“jangan biarkan kegagalan meruntuhkan semangatmu, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih baik.”

(Tariq Ramadan)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Qs. Ar-Ra'd ayat 11)

Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu,
Jangan pernah melupakan tujuanmu.

(Monkey D Luffy)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat rahmat dan karunianya serta Ridho-nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yaitu bapak dan ibu, serta saudara saya yang telah memberikan dukungan dan do'anya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk dosen pembimbing saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Telp.(0411)8669712 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : SASKIA

No. Stambuk/NIM : 105721104620

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juni 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H. Sultan Sarda., M.M
NIDN: 0015075903

Pembimbing II

Masrullah. SE., M. Ak.
NIDN : 0923089201

Mengetahui,

Dekan



Dr.H. Andi Jam'an. SE.. M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Nasrullah. S.E.,M.M
NBM:1151 132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Telp.(0411)8669712 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : SASKIA, Nim : 105721104620 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 226 TAHUN 1445 H/ 2023 M, Tanggal 08 Muharram 1445 H/ 26 Juli 2023 M. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA MANAJEMEN** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Muharram 1446 H
08 Juli 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr.H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, M.M
2. Alamsjah, S.T.,S.E.,M.M
3. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
4. Masrullah, S.E., M.Ak 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr.H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung igra Lt.7 Telp.(0411)8669712 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SASKIA
Stambuk : 105721104620
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 08 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



SASKIA
Nim : 105721104620

Diketahui Oleh:



Dekan,
Dr.H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi
(Masrullah, S.E., M. Ak
NBM : 1151 132

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SASKIA

Nim : 105721104620

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Neneksklusif (Non-exclusive Royalt Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 08 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



SASKIA

Nim : 105721104620

ABSTRAK

SASKIA 2024. Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Sultan Sarda dan Masrullah

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang berlangsung pada tanggal 30 April 2024 sampai 30 Mei 2024. Sampel ini diambil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data subyek, data fisik, data documenter. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survey, observasi, hingga kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian data didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mengenai Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu dengan perencanaan yang matang, pencatatan administrasi yang terstruktur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah berupaya mengurangi terjadinya SILPA.

Kata Kunci : Aspek Manajemen Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

ABSTRACT

SASKIA 2024. Factors in the Regional Financial Management Aspects of the Surplus Budget Calculation (SILPA) at the Gowa Regency Education Office. Thesis, Management Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Sultan Sarda and Masrullah

This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach, which aims to determine the factors in the Regional Financial Management Aspect of the Surplus Budget Calculation (SILPA) at the Gowa Regency Education Office. This research was carried out at the Gowa Regency Education Office which took place from 30 April 2024 to 30 May 2024. This sample was taken from the Gowa Regency Education Office. The types of data used in this research are secondary data and primary data. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. In this research, the data sources used in data collection include subject data, physical data, documentary data. The research instruments used in this research used survey, observation and literature review methods. Based on the research results, data was obtained through in-depth interviews, observations and documentation, where all the informants who conducted in-depth interviews were the head of the Gowa Regency Education Office, Head of the General and Personnel Subdivision, Head of the Financial Accounting Subdivision and Secretary of the Gowa Regency Education Office regarding factors. Factors in the Regional Financial Management Aspect of Over Remaining Budget Calculations (SILPA) at the Gowa Regency Education Service which was discussed previously, the author draws the conclusion that with careful planning, structured administrative records, and increasing human resource competency, the Gowa Regency Education Office has made efforts to reduce the occurrence of SILPA.

Keywords : Regional Financial Management Aspects of Remaining Over Budget Calculations (SILPA).

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Baharuddin Dg Situru dan Ibu Rosmiati Dg Nurung yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Sultan Sarda., M.M selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Masrullah. SE.,M. Ak. selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
10. Terima kasih untuk kakak saya Ilham Baharsyah yang selalu memberikan support secara finansial maupun non finansial walaupun dari jauh.

11. Dan tidak lupa saya juga ucapkan terimakasih pada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang telah mengizinkan dan membimbing saya selama melaksanakan penelitian.
12. Kepada diri saya sendiri terimakasih untuk diri saya Saskia yang telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan dari luar. Yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan kuliah atau dalam proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.wb

Makassar, 16 Mei 2024

Saskia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).....	8
2. Manajemen Keuangan	9
3. Keuangan Daerah	10
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi SILPA	10
5. Anggaran Dan Realisasi Anggaran	13

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Anggaran	14
B. Tinjauan Empiris	15
C. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Fokus Penelitian	23
C. Situs Dan Waktu Penelitian	23
D. Jenis Dan Sumber Data.....	24
E. Informan	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Instrumen Penelitian.....	27
H. Metode Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	29
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	43
C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan).....	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir	22
3.1 Alir Analisis Data	28
4.1 Struktur Organisasi	30



DAFTAR TABEL

2.1 Tinjauan Empiris	15
3.1 Informan Penelitian	25
4.1 Karakteristik informan	44
4.2 Efisiensi Belanja Daerah Priode 2022-2023	52
4.3 Hasil SILPA	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	66
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian Dan Surat Balasan	69
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	73
Lampiran 4 Hasil Validasi Data	75
Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	76
Lampiran 6 Hasil Validasi Abstrak.....	82
Lampiran 7 Biografi Penulis.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peralihan Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 2001. Dalam perkembangannya, kedua undang-undang tersebut Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan berlakunya undang-undang ini maka terbentuklah pemerintahan daerah yang disertai dengan desentralisasi pemerintahan perpajakan, dimana daerah otonom diberikan kewenangan Negara dalam pengelolaan sumber pendapatan dan kemandirian dalam pengelolaan perekonomian daerah dalam menentukan prioritas pembangunan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan perekonomian Negara dan pemerintah daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Penerapan dalam kedua undang-undang ini akan mempunyai konsekuensi sebagai berikut bagi kawasan pertanggung jawaban, pengalokasian sumber daya itu sendiri secara efektif dan efisien, terutama untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam pengelolaan anggaran daerah terkadang ditemukan kesenjangan dalam perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Sehingga banyak daerah yang baru bisa merealisasikan anggarannya pada pertengahan tahun anggaran, pada akhir tahun anggaran yang belum terealisasi menjadi surplus (SILPA).

Dokumen perencanaan secara parsial adalah dokumen yang hanya memaparkan sebagian kecil dari rencana yang lebih besar. Dokumen ini hanya akan memfokuskan pada suatu aspek saja yaitu pengaruh faktor-faktor manajemen keuangan terhadap tingkat SILPA (penerimaan pendapatan asli daerah) seperti pengelolaan asset, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, dan lainnya. Pencatatan administrasi secara mengacu pada proses pencatatan atau pengelolaan administrasi yang dilakukan secara terpisah atau terbatas pada bagian atau aspek tertentu dari suatu organisasi atau kegiatan. Dalam hal ini, hanya sebagian informasi yang dicatat teratas pada data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor manajemen keuangan yang berpengaruh terhadap SILPA. Misalnya data realisasi penerimaan, pengelolaan asset, pelaksanaan anggaran dan lainnya. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 77 Tahun 2020, Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sedangkan secara simultan dan parsial kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) mengacu pada kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Hal ini bahwa tidak semua anggota SDM memiliki kompetensi yang sama, tetapi mereka memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab

mereka. SILPA (surplus dan investasi pemerintah daerah lainnya) merujuk pada sisa atau kelebihan anggaran pemerintah daerah setelah pengeluaran rutin dan pembayaran utang dilakukan. SILPA mencerminkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk melakukan investasi dan proyek pembangunan dimasa mendatang.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Gowa, parsial kompetensi SDM terhadap SILPA akan merujuk pada sejauh mana anggota SDM dipemerintah kabupaten memiliki kompetensi yang relevan dan memadai untuk pengelolaan SILPA dengan efektif. Artinya mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi investasi atau proyek pembangunan yang menggunakan dana SILPA dengan baik.

Anggaran APBD Kabupaten Gowa (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp 325 milyar yang dibahas pada rapat paripurna DPRD yang diikuti oleh DPRD Gowa. 11 SKPD hadir untuk menginformasikan kepada kantor anggaran mengenai SILPA yang masih berada didepertemennya masing-masing. Ketua DPRD Gowa membahas hasil pokok pengelolaan anggaran masing-masing SKPD tahun 2022. Akuisisi SILPA terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelolah anggaran, permasalahan lainnya adalah beban utang Pemkab Gowa yang perlu dibenahi.

Dalam pengelolaan perekonomian daerah, hal ini diikuti dengan sebab akibat dalam hubungan perekonomian antara Negara dan pemerintah daerah yang menunjukkan asas pada prinsip uang yang megikuti fungsi money follow function, yang artinya bentuk transisi harus diikuti dengan pengalihan kekuasaan. Pendanaan yang diperlukan untuk

melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas pemerintahan yang bertanggung jawab pada setiap masing-masing tingkat administrasi pada pemerintahan. Selain itu, penatausahaan anggaran daerah terangkum dalam suatu dokumen keuangan, wajib antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau DPRD yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi, yang dibahas dan disetujui bersama oleh provinsi dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mardiasmo (2012) mendefinisikan APBD merupakan instrumen politik pemerintahan daerah yang paling penting dan dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi pegawai dan sebagai alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Oleh karena itu idealnya dalam APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat atau pentingnya public dengan berbagai potensi dan sumberdaya nyata yang dimiliki daerah serta pengeluaran untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Jika melihat APBD yang disajikan, kecenderungan daerah mengalami defisit anggaran disebabkan oleh adanya SILPA dalam APBD yang berarti rata-rata defisit nasional (gabungan provinsi, Kabupaten, dan kota) adalah sebesar 7,5%. Dengan kontribusi SILPA dalam menutup

defisit sekitar 91,3%, sedangkan kontribusi pinjaman dan pendapatan pinjaman daerah sebesar 5,9%. Pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana yang disebut sebagai perhitungan anggaran (SILPA). Semakin besar SILPA menunjukkan kurang cermatan dalam penganggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran sehingga rasio SILPA terhadap belanja menunjukkan porsi yang tertunda atau anggaran yang tidak terserat.

Kehadiran SILPA dalam pengelolaan keuangan daerah harus dihindari karena melemahkan proses penganggaran APBD yang bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Besarnya dimensi SILPA dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan. Menurut penelitian sebelumnya Bali (2013), meskipun belum diketahui secara pasti faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya SILPA, namun keberadaan SILPA kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelebihan pendapatan daerah yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan anggaran dan pelaksanaannya oleh SILPA, biaya administrasi daerah yang kurang dari jumlah maksimum. Selain itu, dievaluasi dari beberapa faktor yang ditemukan terkait dengan munculnya SILPA, dikarenakan adanya efisiensi atau penghematan belanja pemerintah yang belum dilaksanakannya program/inisiatif sehingga anggaran tidak terserap. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Kamelia (2017) tentang faktor penyebab adanya SILPA, mengemukakan bahwa SILPA memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan daerah, sisa investasi, dan sisa non investasi terhadap SILPA.

Meskipun keberadaan SILPA masih dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun peneliti mencoba memadukannya dengan penilaian BPK yang digunakan sebagai bentuk kajian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Virgasari (2009), opini audit mempunyai dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) merupakan salah satu sumber pendapatan keuangan yang salah satunya menutup defisit, sehingga menghitung selisih antara surplus/defisit anggaran dengan hasil pembiayaan bersih pada SILPA dengan (huruf I) yaitu surplus anggaran tahunan yang berlebihan.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan fokus pada Faktor-faktor dalam aspek manajemen keuangan daerah terhadap SILPA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan manajemen keuangan untuk mencapai SILPA yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Faktor-Faktor Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa” ?.

C. Tujuan penelitian

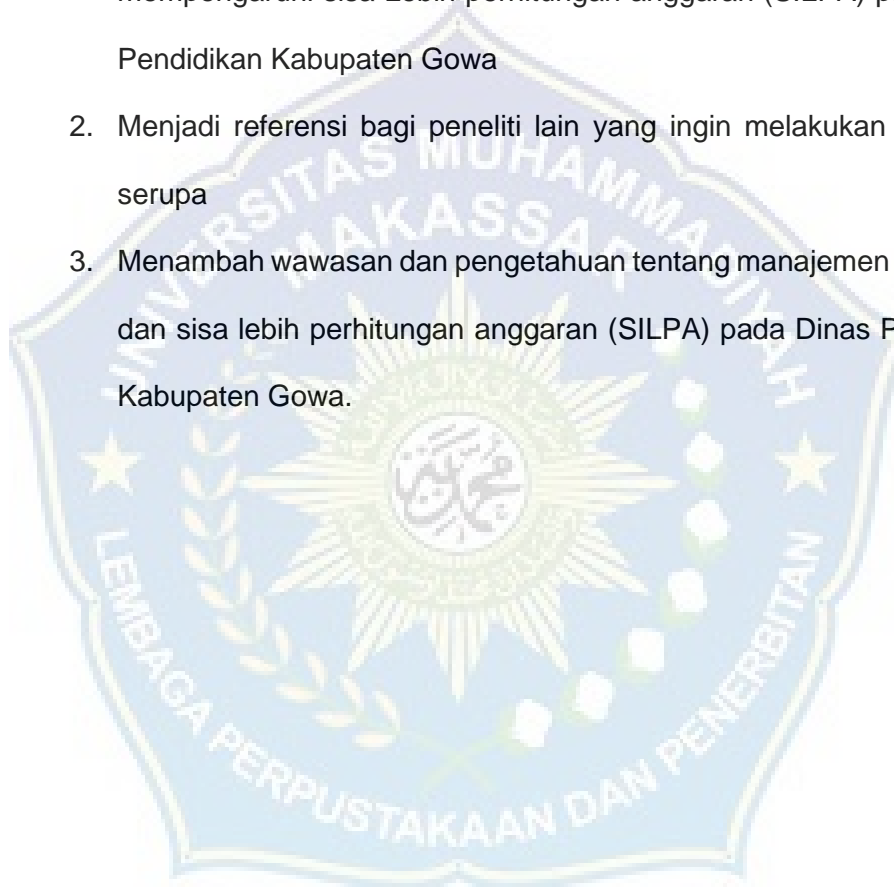
Tujuannya penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengetahui dan dapat mendeskripsikan faktor-faktor dalam aspek manajemen

keuangan daerah terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sisa Lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
2. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa
3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keuangan dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)

Pada akhir periode anggaran, istilah SILPA digunakan untuk sisa anggaran. Mahmudi (2009) menyatakan bahwa SILPA adalah sisa anggaran dan merupakan selisih antara rencana pendapatan dan rencana belanja pada akhir tahun anggaran, yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian dijadikan aslinya dengan sisa uang tunai pada anggaran berikutnya. SILPA adalah selisih antara surplus/defisit dengan pendapatan bersih. SILPA dapat dijadikan sebagai salah satu indikator efektivitas belanja pemerintah, karena SILPA hanya terjadi bila APBD surplus dan pada saat yang sama terdapat pembiayaan netto positif atau pembiayaan netto lebih besar dibandingkan dengan defisit APBD. Jika surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SILPA, maka defisit APBD tahun depan bisa tertutupi. SILPA ini terdiri dari realisasi penerimaan PAD yang melebihi target, adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga anggaran tidak terserap, dan selisih pengeluaran aktual dan yang dianggarkan.

Sementara itu, Rahmawati, A (2015) menjelaskan bahwa SILPA atau surplus anggaran adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Surplus anggaran tahun sebelumnya menjadi pendapatan keuangan pada tahun berjalan. Jika indikator SILPA positif berarti setelah defisit

anggaran dikurangi, masih ada sisa pembiayaan bersih yang ada tersisa (misa I(Rp 2 Milyar)). Atau dengan penjelasan lain masih ada sisa dana anggaran, penerimaan keuangan sebesar Rp 2 miliar yang tidak digunakan untuk membiayai keuangan daerah dan atau pengeluaran daerah.

Jika angka SILPA negatif berarti pembiayaan netto tidak mampu menutupi defisit anggaran yang ada. Oleh karena itu harus dicarikan solusinya. Misalnya mencari sumber pendapatan finansial lain seperti uang dll. Atau dengan mengurangi biaya dan/atau biaya finansial sehingga angka SILPA menjadi nol. Dari uraian diatas terlihat bahwa salah satu sumber uang daerah untuk menutupi defisit anggaran adalah surplus anggaran daerah (SILPA) pada tahun sebelumnya. Menurut informasi yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Republik Indonesia, hampir seluruh APBD di Provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia mengalami defisit pada tahun anggaran 2009.

2. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi, dengan tujuan mencapai keuangan dalam cara yang efisien dan efektif. Manajemen keuangan melibatkan pengelolaan asset, kewajiban, modal, arus kas, dan risiko keuangan.

3. Keuangan daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, pasal 1(1) menjelaskan keuangan daerah, yaitu segala hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang bisa diregionalisasi harta benda yang berkaitan dengan hak dan kewajiban teritorial.

Pengelolaan Perekonomian Daerah adalah serangkaian kegiatan yang terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengendalian perekonomian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3(1) yang menjelaskan bahwa pengelolaan perekonomian daerah harus dilaksanakan secara sistematis, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan pemerataan perhatian, relevansi, dan keuntungan kepada masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keuangan daerah yang melalui suatu proses administrasi yang terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengendalian dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau provinsi

4. Factor-faktor yang mempengaruhi SILPA

Pinto (2013). SILPA dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari sudut pandang dokumen perencanaan, dokumen administrasi

atau pencatatan dan keahlian SDM. Lihat uraian berikut untuk informasi lebih lanjut:

a. Dokumen Perencanaan

- 1) Menurut Pinto (2013) dokumen perencanaan daerah terdiri dari: Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), yaitu rencana untuk mencapai tujuan pemerintah federal menurut undang-undang federal.
- 2) Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun menurut masa jabatan kepala daerah terpilih, yang disusun berdasarkan visi, misi dan program pengelolaan wilayah
- 3) Rencana strategi satuan kerja mesin daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, siap untuk dilaksanakannya RPJM daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan SKPD pemerintah daerah
- 4) rencana kerja pemerintah daerah (RKP) merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang harus disusun oleh provinsi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- 5) Rencana kerja satuan kerja mesin daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun pada setiap SKPD selama 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dan tugas SKPD yang berkaitan berdasarkan tujuan (indikator), hasil dan keluaran yang terukur, serta rincian keuangan

b. Pencatatan administrasi

Manajemen dalam arti sempit menurut Handayani (1988), “administrasi berasal dari kata sempit Administratie (Belanda), yang meliputi catatan, surat menyurat, akuntansi ringan, tulisan agenda, dan lain-lain, yang secara teknis bersifat administratif”. Sedangkan administrasi dalam arti luas Menurut Gie (1980) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Kompetensi sumber daya manusia

Menurut Nawawi (2021) ada tiga pengertian sumber daya manusia yang pertama Sumber daya manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, kedua, Sumber daya manusia yang berpotensi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Dan yang ketiga Sumber daya manusia yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis.

5. Anggaran Dan Realisasi Anggaran

Eksekusi anggaran merupakan istilah lain dari penyerapan anggaran, yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai kesenjangan antara rencana atau sasaran anggaran dengan pelaksanaan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Efisiensi anggaran biasanya dinyatakan sebagai nilai moneter nominal. Realisasi tersebut dapat bernilai sama dengan tujuan atau lebih tinggi (positif) atau lebih rendah (negatif) dari tujuan dan keberadaan realisasi tersebut sangat bergantung pada perkiraan (Mahmudi, 2009).

Berdasarkan Undang-undang Administrasi Provinsi Nomor 32 Tahun 2004, APBD diartikan sebagai rencana aksi keuangan pemerintah provinsi, yang satu bagiannya menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah pada tahun anggaran tertentu, dan satu bagian lagi menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah pada tahun anggaran tertentu. Memberikan perkiraan pendapatan dan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada dasarnya merupakan pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) berupa rencana keuangan tahunan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD

merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Anggaran

Secara Konseptual, perubahan pendapatan mempengaruhi biaya atau pengeluaran, namun tidak semua tambahan pendapatan selalu dialokasikan ke biaya yang signifikan. Mengenai alokasi yang berkaitan dengan sumber pembiayaan pendapatan, besaran pendapatan mengatur alokasi pengeluaran. Perubahan APBD merupakan sarana bagi parlemen dan eksekutif untuk mengatur alokasi anggaran. Sebuah penelitian (Abdullah dan Asmara, 2006, Krenn, 2017) menemukan adanya perbedaan antara eksekutif dan legislatif dalam alokasi perubahan PAD terhadap total belanja sektor. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD meningkat, namun alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru menurun, ia menduga besarnya kekuasaan legislatif membuat keleluasaan menggunakan cabang PAD tidak sesuai dengan referensi masyarakat.

Perilaku oportunistik lembaga legislatif dan eksekutif dalam perubahan APBD dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran negara. Studi (Fanthony, 2011, Sucahya, 2016) menunjukkan bahwa porsi PAD yang rata-rata sebesar 10 persen terhadap total pendapatan daerah, cenderung meningkat seiring dengan perubahan anggaran.

B. Tinjauan Empiris

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka penulis akan mengutip beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variable	Analisis Alat	Hasil Penelitian
1.	Ida Ayu Gede, Sutha Megasari (2015)	Pengaruh pendapatan asli daerah, selisih lebih perhitungan anggaran dan flypaper effect pada perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Kabupaten/Kota di Bali	Variabel Independen: Pendapatan asli daerah, selisih lebih perhitungan anggaran, flypaper effect. Variabel Dependen: Perilaku oportunistik penyusunan anggaran	Analisis regresi data panel dengan alat uji statistic eviews.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> - PAD tidak berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran Kabupaten/ Kota di Bali. - SILPA berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran Kabupaten/ Kota di Bali. Flypaper effect tidak berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Kabupaten/ Kota di Bali.
2.	Yahya Sucahya (2017)	Peluang perilaku oportunistik penyusunan anggaran	Variable Independen: Pendapatan asli daerah, Selisih lebih	Analisis Regresi Exact Logistic	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh

		perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sintang	perhitungan anggaran, Bagi hasil pajak provinsi. Variable Dependensi: Probabilitas perilaku oportunistik penyusunan anggaran perubahan		<p>h positif terhadap probabilitas perilaku oportunistik penyusunan anggaran perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sintang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SILPA tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas perilaku oportunistik penyusunan anggaran perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sintang <p>BHPP tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas perilaku oportunistik penyusunan anggaran perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sintang.</p>
3.	Sayu Made Parwati (2015)	Perilaku oportunistik penyusunan anggaran	Variabel Independen: Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Selisih lebih perhitungan anggaran. Variabel Dependensi:	Analisis uji asumsi klasik	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran di

			Oportunistik penyusun anggaran.		<p>Kabupaten /Kota di se-Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAU berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten /Kota se-Bali. <p>SILPA berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten /Kota se-Bali.</p>
4.	Anita De grave, Raja Vanaldo Boang Manalu, Rein J. wekan (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Flypaper Effect Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan anggaran	<p>Variabel Independen: Bahwa variabel pendapatan daerah (X1) dan flypaper effect (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku oportunistik pengambilan anggaran (Y). Variabel Dependen: Karena pendapaan daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik</p>	Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan awal daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penganggaran Pemerintah /Kota di Provinsi Maluku, artinya semakin tinggi pendapatan awal daerah maka semakin

			dalam penganggara n (Y).		<p>besar pula perilaku oportunistik pengambilan anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paper fly effrct berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik pengambilan anggaran di Kabupaten/ Kota Maluku yang artinya, menyebabkan perilaku oportunistik pengambilan anggaran semakin meningkat. <p>Sedangkan pendapatan awal daerah (PAD) dan flypaper effect berpengaruh terhadap perilaku oportunistik pengambilan anggaran di Kabupaten/ Kota di Maluku.</p>
5.	Yulia Rani (2019)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Kinerja Keuangan Daerah	Variabel Bebas: Kelebihan pendapatan daerah (X1), sisa biaya modal (X2), dan sisa biaya non modal (X3)	Analisis regresi	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hubungan positif antara pendapatan daerah dengan SILPA

			<p>berhubungan positif terhadap SILPA Variabel Dummy: Rasio kemampuan mempertahankan WTP yang negative (D) berarti SILPA menurun pada daerah yang mampu mempertahankan WTP dibandingkan dengan daerah yang tidak dapat mempertahankan WTP.</p>	<p>sehingga dapat diprediksi. Sebab, jika dibiarkan akan menambah keberadaan SILPA yang dinilai kurang baik dalam menjalankan perekonomian daerah.</p> <p>- Sisa investasi akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap SILPA. Artinya, peningkatan sisa investasi atau belanja akan meningkatkan SILPA di wilayah administrasi Daerah/Kota Jawa Timur.</p> <p>Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sisa belanja non modal dengan SILPA yang menunjukkan hasil positif signifikan sehingga menolak H_0,</p>
--	--	--	--	--

					sehingga peningkatan sisa belanja non modal meningkat SILPA di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.
6.	Rahma Gita Muslimah dan Verawati (2020)	Pengaruh pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan SILPA pada perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan asli daerah - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus - Sisa lebih perhitungan anggaran. <p>Variabel Dependen: Perilaku oportunistik penyusun anggaran</p>	Analisis alat yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD tidak berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten /Kota se-Sumatera Selatan. - DAU berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten /Kota se-Sumatera Selatan. - DAK berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten /kota se-Sumatera Selatan. <p>SILPA tidak berpengaruh positif terhadap</p>

					perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten /kota Se-Sumatera selatan.
7.	Mega Dheane Tia (2018)	Pengaruh perubahan pendapatan asli daerah dan perubahan selisih lebih perhitungan anggaran terhadap perilaku oportunistik eksekutif penyusun anggaran (studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)	Variabel Independen: - Perubahan pendapatan asli daerah - Perubahan selisih lebih perhitungan anggaran Variabel Dependen: Perilaku oportunistik penyusun anggaran	Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa - Perubahan PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik eksekutif penyusun anggaran serta perubahan anggaran pada Kabupaten /kota di Indonesia. Perubahan SILPA berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada Kabupaten /kota di Indonesia.
8.	Ni Kadek Ayu Suartini, Dodik Ariyanto, Maria M. Ratna Sari (2016)	Determinan perilaku oportunistik penyusun anggaran calon incumbent terkait pilkada serentak Tahun 2015	Variabel Independen: - Pendapatan Asli daerah - Dana alokasi Khusus Variabel Dependen: Perilaku Oportunistik	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa - PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran calon incumbent di

			penyusun anggaran calon Incumbent.		Kabupaten /Kota se-Indonesia DAK berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran calon incumbent di Kabupaten /Kota se-Indonesia
9.	Cut Huri Handayani, Dr. Iskandar Muda, SE.,M.Si.,Ak, CA (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran SKPD di provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 dengan SILPA sebagai variabel moderating	<ul style="list-style-type: none"> - Serapan anggaran (Y) - Regulasi keuangan daerah (X1) - Politik anggaran (X2) - Proses pengadaan barang dan jasa (X3) - Komitmen organisasi (X4) Silpa (Z)	Analisis alat yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> - Analisis secara simultan maka regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran SKPD pada pemerintah provinsi Sumatera Utara. - Secara persial variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh

					<p>h positif signifikan terhadap serapan anggaran SKPD di pemerintah provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Silpa tidak mampu memoderasi hubungan antara regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa dan komitmen organisasi dengan serapan anggaran SKPD di pemerintah provinsi Sumatera Utara.</p>
10.	Safira Salgo Safitri, Kartika, Andriana, Amis Budi Santoso (2022)	Analisis penyebab dan dampak adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Variabel Dependen	analisis alat yang digunakan yaitu statistik parametrik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa - Terjadinya defisit anggaran berdasarkan penyusunan anggaran

					<p>Kabupaten Bondowos o dengan komponen APBD yaitu pendapata n daerah dianggarka n dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan berdasark anpada ketentuan undang-undang.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>- Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib pelayanan dasar terlebih dahulu setelah itu untuk belanja lainnya dengan tetap memperhatikan target capaian prioritas pembangunan nasional.</p> <p>SILPA pada pemerintah Kabupaten</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Bondowoso terdiri atas komponen APBD yang paling berpengaruh yaitu pelampauan pendapatan dan sisa anggaran belanja serta dampak adanya SILPA terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya</p>
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arah penalaran untuk bisa memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah disebutkan. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Ainun 2021) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian hanya kepada analisis factor dalam aspek manajemen keuangan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa”.

C. Situs Dan Waktu Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan sebuah data maka peneliti harus menentukan lokasi yang akan diteliti maka obyek pelaksanaan penelitian ini dilakukan dikabupaten Gowa dengan data yang akan dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa di Jl. Masjid Raya No. 30 Kabupaten Gowa. bertempat di Jl. Masjid Raya No.30, Sungguminasa, Kec, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi selatan 92111, untuk pengambilan

data keuangan berupa laporan pertanggungjawaban. Dan waktu penelitian yaitu dua bulan terhitung dari bulan desember sampai february setelah dilakukannya seminar proposal, guna agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbukti kebenarannya.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk huruf maupun bilangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti untuk menggali informasi dan relevan dengan masalah penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen dari hasil pencatatan keuangan yang ada di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Adapun data penelitian terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu:

1. Data subyek

data subyek adalah data penelitian yang disampaikan sendiri oleh responden secara individu atau secara kelompok sumbernya.

2. Data fisik

Data fisik adalah Ini adalah jenis data penelitian yang berupa hal-hal fisik, seperti buku, bangunan, pakaian, atau bagian dari bangunan.

3. Data documenter

Data documenter adalah Ini adalah jenis data penelitian yang berupa surat-surat faktur, jurnal, surat-surat, notulen rapat, memo, atau laporan program.

E. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Terry 2021). Pemanfaatan Informan dalam penelitian ini bertujuan agar dalam waktu yang terbatas peneliti dapat menjangkau banyak informasi. Pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang faktor dalam aspek manajemen keuangan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa maka penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada kebutuhan penelitian dan disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.

Table 3.1 Informan

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas pendidikan kabupaten Gowa	1	Key Informan
2	Kepala sub bagian keuangan dinas pendidikan kabupaten gowa	1	Key Informan
3	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian dinas pendidikan kabupaten gowa	1	Informan
4	Sekretaris dinas pendidikan kabupaten gowa	1	Informan
	Total	4	

Sumber : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Gowa Diolah :2024

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Yang Penulis Lakukan Adalah, Sebagai Berikut:

1. Observasi

Digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat kegiatan pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa secara langsung untuk menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Wawancara (*interview*)

Dalam survei, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Peneliti akan mewawancarai para pemimpin dan pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk mempelajari tentang organisasi secara keseluruhan, Lokasi, dan system pengelolaan keuangan yang diterapkan. Datar wawancara terlampir dibagian lampiran.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menyelidiki catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipasi (*participant observer*) sebagai pendukung, wawancara dan analisis dokumen (Terry 2021).

Metode ini digunakan untuk mendapat data-data yang sifatnya tertulis, seperti sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara agar validitasnya tidak diragukan lagi.

G. Instrumen Penelitian

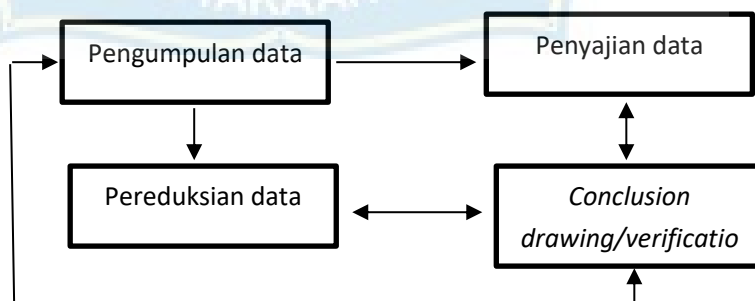
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey, observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu berupa: Perekam suara, Alat tulis, Daftar pertanyaan wawancara. Buku, jurnal, dan referensi lainnya

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Metode menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Terry 2021).

Setelah mengumpulkan data, penulis membuatnya disusun dan diklarifikasi untuk dijelaskan dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sehingga orang dapat memahaminya dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian.

- 1) Tahap pertama dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang konsistensi program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.
- 2) Tahap kedua dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian dokumen anggaran dan standar biaya yang telah ditetapkan. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang penerapan standar biaya pada proses penganggaran.
- 3) Tahap ketiga dilakukan dengan cara menganalisis data dokumen realisasi anggaran. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tren anggaran serta varian realisasi anggaran yang merupakan bagian dari besaran SILPA. Analisis dokumen realisasi anggaran dilakukan dengan cara menganalisis varian realisasi anggaran.
- 4) Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan analisis data tekstual. Berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Sumber :sugiono 2018

Gambar 3.1 Analisis data teori miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan tentang Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Gowa: Pada awalnya, pengelolaan pendidikan di Kabupaten Gowa dilakukan secara terbatas oleh beberapa lembaga pendidikan non-formal dan sekolah-sekolah rakyat. Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan politik di Indonesia, terjadi kebutuhan untuk memperkuat sistem pendidikan formal di daerah ini.

Pembentukan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa: Tahun berdirinya kantor dinas pendidikan di Kabupaten Gowa ditandai sebagai langkah penting dalam upaya untuk mengorganisir dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Kantor dinas pendidikan dibentuk sebagai entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan di wilayah Kabupaten Gowa.

Peran dan Fungsi Kantor Dinas Pendidikan: Dalam sejarahnya, kantor dinas pendidikan Kabupaten Gowa memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, pengawasan, serta pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu, kantor dinas pendidikan juga berperan dalam menciptakan

lingkungan pendidikan yang kondusif dan inklusif bagi masyarakat Kabupaten Gowa

a. Visi dan misi organisasi

1) Visi

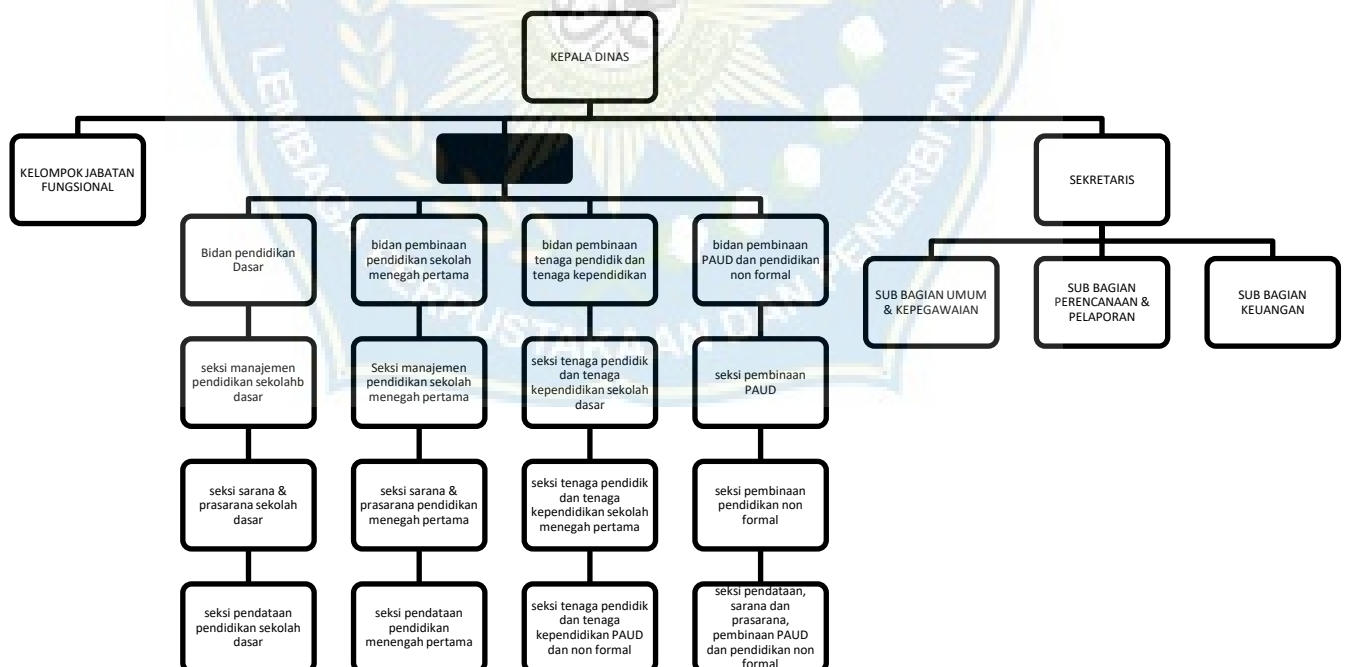
Menjadi organisasi perangkat daerah yang mampu memenuhi standar pelayanan publik.

2) Misi

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan

b) Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan dan mewujudkan inovasi pelayanan

b. Struktur organisasi dan *job description*



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

1) Kepala Dinas

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan bidang pendidikan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a) Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan; Renstra Dinas Pendidikan
- b) Memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan

perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c) Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- d) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis dibidang pendidikan;
- f) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan manajemen guru dan tenaga kependidikan serta pembangunan sarana dan pengadaan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar;
- h) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar;

- i) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan manajemen guru dan tenaga kependidikan serta pembangunan sarana dan pengadaan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar;
- j) Memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas; Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten
- k) Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten agar sasaran organisasi tercapai;
- l) Menyelia pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
- m) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan kewenangan pemerintah daerah agar sasaran organisasi tercapai;

- n) Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a) Mengoordinasikan perumusan rencana kerja Dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan Dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b) Memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran sekretariat, bidang dan UPT berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c) pembina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d) Memimpin dan mengarahkan Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f) Menyelia pelaksanaan tugas organisasi dalam lingkup Sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas; Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- g) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- i) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;

- j) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- k) Mengoorganisasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- l) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
- d. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan Dinas; Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- h. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan guna tertib administrasi perkantoran;
- i. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana

program, kegiatan dan anggaran berdasarkan ketentuan teknis guna tertib administrasi pelaporan;

- k. Mengoodinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
 - l. Menghimpun, menyajikan dan melaporkan data dan informasi dinas berdasarkan hasil pemantauan untuk evaluasi kinerja dinas;
 - m. Melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran;
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
 - o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan ASN untuk pengembangan karier;
- c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar berdasarkan uraian tugas dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas; Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kinerja ASN, pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan;

- h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup Dinas sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi, hukum dan perundang-undangan, administrasi surat tugas, perjalanan dinas pegawai, tata upacara berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- k. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkup dinas;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu sub bagian keuangan berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- d. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- g. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengoordinasian, dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji

pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;

- h. Melaksanakan pengendalian perbendaharaan keuangan, penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan dan pengendalian tugas pembantu pemegang sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas sub bagian keuangan guna tertib administrasi perkantoran;
- j. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- k. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi keuangan dan penerimaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- n. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan desember Dimana seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah kapala dinas pendidikan kabupaten gowa kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian akuntansi keuangan dan sekretaris dinas pendidikan kabupaten gowa.

a. Karakteristik Informan

Penentuan Informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan judul penelitian, karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti, Purposive sampling adalah teknik sampling non-probabilistik di mana informan dipilih berdasarkan penilaian peneliti tentang siapa yang paling dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik penelitian. Peneliti menggunakan pengetahuan dan pertimbangan mereka untuk memilih informan yang memenuhi kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 4.1 karakteristik informan

NO	INISIAL NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	TM	LK	Kepla Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
2.	RS	PR	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
3.	MN	LK	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
4.	DR	PR	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Sumber : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Diolah :2024

b. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara Mengenai Sisa Lebih Pencatatan Anggaran (SILPA) di Kantor Dinas pendidikan Kabupaten Gowa dimana penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer ini berasal dari hasil wawancara kepada informan yaitu kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian perencanaan dan pelaporan. tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif di kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa,

1) Aspek perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan perencanaan pada kantor dinas pendidikan kabupaten gowa menurut Bapak (TM) , Bapak (MN), Ibu (RS) dan Ibu (DR) maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan sebelum melakukan pelaporan keuangan di kantor Dinas pendidikan kabupaten Gowa sudah ?

“perencanaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten gowa dimuat dalam Rencana Strategi RENSTRA Yang Merupakan Dokumen Perencanaan Yang Dibuat Untuk 5 Tahun Masa Kerja yang termuat Dalam Bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”**(Pak TM)**

Hal senada juga disampaikan sekretaris dinas pendidikan kabupaten gowa dimana :

“setiap 5 tahun sesuai dengan undang-undang pelaksanaan penyusunan RENSTRA dibuat dalam 5 tahun masa kerja yang

memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan dinas pendidikan kabupaten gowa”.**(Ibu RS)**

“Perencanaan keuangan yang dilakukan itu seperti penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran atau RKA, dan Dokumen Pelaksanaann Anggaran (DPA) nya, perencanaan Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta perencanaan keuangan lainnya.” **.(Pak MN)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dinas dan sekretaris dinas pendidikan kabupaten gowa bahwa perencanaan manajemen keuangan di kantor dinas pendidikan kabupaten gowa sudah dilakukan dan terbilang cukup baik Perencanaan yang dilakukan adalah pembuatan laporan fisik keuangan bulanan, triwulan, laporan semester dan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban didalam melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang dilakukan itu seperti penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran atau RKA, dan Dokumen Pelaksanaann Anggaran (DPA) nya, perencanaan Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta perencanaan keuangan lainnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, mengenai dalam pengelolaannya menggunakan aplikasi apa dan Apakah sistem tersebut berpengaruh terhadap besarnya SILPA?

“Menggunakan aplikasi ekmis dari BPKPRI jadi penerapannya itu sesuai dengan renstra yang ada dan disusun dengan baik, yang penting kegiatan berlangsung SILPA juga akan minim dan 100% akan realisasi.” **.(Pak TM)**

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala sub bagian Keuangan dinas pendidikan kabupaten gowa :

“Dimana pelaporan masih menggunakan aplikasi ekmis yang dari BPKP tapi untuk 2024 diwajibkan untuk menggunakan SIPD RI Jadi Setiap Tahun Itu Ada Laporan Pertanggungjawaban Yang Dibuat Dan Disusun Menggunakan Aplikasi Dari BPKRI.”(Ibu DR)

Kemudian peneliti menggali informasi dengan pertanyaan, Bagaimana proses penganggaran, penyaluran, dan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa? Apakah proses-proses tersebut berpengaruh terhadap tercapainya SILPA?

“Kasusnya pasti berpengaruh karena mulai dari penganggaran, belum juga satu penganggarnya 100 juta pada saat pelaksanaan cuman tercapai 90 juta itu adanya selisih SILPA 10 juta dan disitulah biasanya dievaluasi apa penyebab terjadinya SILPA sebagai 10 juta itu.”(Ibu DR)

Berdasarkan wawancara tersebut analisis penelitian penerapan Perencanaan Pada Dinas Pendidikan Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Proses perencanaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mencakup berbagai tahapan yang berlandaskan dokumen strategis dan peraturan yang jelas. Menurut Pak TM, perencanaan dimuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahun masa kerja dan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ibu RS, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, menambahkan bahwa penyusunan RENSTRA setiap lima tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dinas.

Pak MN menjelaskan lebih lanjut bahwa perencanaan keuangan meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (Renja). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Dinas

Pendidikan menggunakan aplikasi Eksekutif Manajemen Informasi Sistem (EKMIS) dari BPKP RI. Pak TM menyatakan bahwa penerapan yang sesuai dengan RENSTRA dan pengelolaan yang baik akan meminimalkan SILPA dan memastikan realisasi anggaran mencapai 100%.

Ibu DR, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, menegaskan bahwa pelaporan keuangan masih menggunakan aplikasi EKMIS dari BPKP, namun mulai tahun 2024, akan diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Setiap tahun, laporan pertanggungjawaban disusun menggunakan aplikasi ini untuk memastikan akuntabilitas.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa proses penganggaran, penyaluran, dan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki pengaruh signifikan terhadap tercapainya SILPA. Ibu DR memberikan contoh kasus di mana anggaran sebesar 100 juta rupiah hanya terealisasi 90 juta rupiah, sehingga terjadi selisih SILPA sebesar 10 juta rupiah. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA tersebut.

Dengan adanya perencanaan yang matang melalui dokumen strategis seperti RENSTRA dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang tepat, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya mengurangi terjadinya SILPA. Evaluasi rutin dan penyesuaian metode pelaporan merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan anggaran dapat direalisasikan sesuai rencana dan

meminimalisir sisa anggaran yang tidak terpakai.

2) Pencatatan Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan perencanaan pada kantor dinas pendidikan kabupaten gowa menurut Bapak (TM) , Bapak (MN), Ibu (RS) dan Ibu (DR) maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut:

Apakah dalam proses pencatatan keuangan ini SILPA Sering terjadi

“Iya SILPA ini sering ad ajika ada kegiatan yang tidak terlaksana dalam setahun itu” **(Pak TM)**

Hal senada juga disampaikan oleh kasubag keuangan

“Faktor terjadinya SILPA itu biasa berasal dari kegiatan yang sudah dianggarkan diawal tahun namun pada realisasinya tidak seratus persen tercapai. Misalkan adanya kegiatan yang sudah direncanakan tapi ditahun berjalan tidak dilaksanakan dan itulah terjadinya SILPA.”**(Pak MN)**

“Proses pencatatan keuangan ini dilakukan sesuai dengan dokumen pelaksanaan Anggaran ”**(Ibu RS)**

Strategi apa saja yang digunakan untuk mengatasi masalah pencatatan administrasi ?

“Masalahnya yah itu tadi karna kegiatan yang sepenuhnya tidak terlaksana maka dalam pencatatan SPJ Pertahun Sering Terjadi SILPA, tetapi kami sering mengadakan evaluasi agar SILPA ini tidak terjadi kembali di tahun yang akan datang”**(DW)**

Berdasarkan hasil wawancara Mengenai penatausahaan keuangan pada kantor dinas pendidikan kabupaten gowa menurut Bapak (TM), (MN) dan Ibu (RS) (DW) maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut:

Dalam proses pencatatan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, kerap kali muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Pak TM menjelaskan bahwa SILPA sering terjadi ketika ada

kegiatan yang tidak terlaksana dalam setahun. Hal ini diperkuat oleh pernyataan kasubag keuangan, Pak MN, yang menjelaskan bahwa SILPA biasanya berasal dari kegiatan yang sudah dianggarkan di awal tahun namun pada realisasinya tidak sepenuhnya tercapai. Misalnya, ada kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dilaksanakan pada tahun berjalan, sehingga menyebabkan adanya SILPA.

Ibu RS menambahkan bahwa proses pencatatan keuangan dilakukan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Namun, meskipun prosedur pencatatan sudah sesuai, tetap ada kendala terkait kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah pencatatan administrasi dan mengurangi terjadinya SILPA, DW menyatakan bahwa evaluasi sering dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA dan mencari solusi agar hal tersebut tidak terulang di tahun berikutnya. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya terus memperbaiki sistem pencatatan keuangan dan memastikan bahwa anggaran yang telah dianggarkan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan perencanaan pada kantor dinas pendidikan kabupaten gowa menurut Bapak (TM) , Bapak (MN) “jika terjadi SILPA dikemanakan dana tersebut?”

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) memiliki dua skenario pengalokasian berdasarkan kondisi anggaran yang tersisa: Jika SILPA Berlebih: SILPA yang berlebih akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Ini berarti dana yang tidak terpakai pada tahun sebelumnya akan dialokasikan untuk proyek-proyek baru atau melanjutkan proyek yang ada, sehingga anggaran tetap berputar dan

mendukung kemajuan pembangunan di sektor pendidikan. Jika SILPA Kurang: jika SILPA ternyata kurang dari yang diharapkan, maka kekurangan ini akan diperhitungkan kembali dalam anggaran tahun berikutnya. Artinya, pemerintah daerah akan menyiapkan kembali alokasi dana untuk menutupi kekurangan tersebut pada tahun anggaran selanjutnya.”

Hasil wawancara dengan Pak MN mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan dua pendekatan tergantung pada kondisi anggaran. Jika SILPA berlebih, dana tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan di tahun berikutnya. Sebaliknya, jika SILPA kurang, kekurangan ini akan dianggarkan kembali pada tahun selanjutnya. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung sektor pendidikan.

3) Kompetensi sumber daya manusia

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kompetensi sumber daya manusia pada kantor dinas pendidikan daerah kabupaten gowa menurut Bapak (TM), (MN) dan Ibu (DW) maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut: Mengenai pengawasan Kemudian peneliti menggali informasi dengan pertanyaan, Apakah ada pengarahan tertentu dari pimpinan berkaitan dengan tujuan lembaga kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa? Bagaimana pengarahan tersebut dilakukan? Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKD Gowa.

“Aturan tertentu itu tidak ada secara spesifik semuanya itu yang namanya pengelolaan keuangan itu Aturannya sudah jelas baik itu undang-undang peraturan pemerintah peraturan menteri keuangan sekaligus peraturan daerah yang kita dibuat sendiri dan peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah itu acuanya dari uu permendagri dan peraturan menteri keuangan, dari segi pengawasan disamping kita melakukan pengawasan ketua bidang tentu juga ini tidak lepas dari pengawasan ekspaktorat dan setiap tahunnya kita itu diawasi oleh BPK dilakukan audit ”(Pak TM)

“Iya, selalu diadakan rapat evaluasi minimal satu kali dalam sebulan yaitu rapat staf disampaikan apa-apa progres yang harus diselesaikan setiap ada masalah maka dilakukan rapat staf untuk mendapatkan solusi, penerpan fungsi pengawasan yang kami lakukan adalah setiap kegiatan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah dilakukan maka dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dan setiap bulanya laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) yang ada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dimuat di website humas Gowa sehingga semua bisa melihat laporan tersebut secara transparan.”(Pak MN)

Dari wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, ketua sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa tentang kompetensi Sumber daya manusia yaitu melakukan evaluasi di setiap pelaksanaan pengelolaan keuangannya dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman RKA dan DPA yang telah dibuat. pengawasan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Menurut Pak TM, pengelolaan keuangan didasarkan pada aturan yang jelas dan komprehensif, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, hingga peraturan daerah yang telah dibuat sendiri. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal melalui ketua bidang, tetapi juga oleh eksternal seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit tahunan. Sementara itu, Pak MN menambahkan bahwa untuk memastikan akuntabilitas, evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali sebulan melalui rapat staf.

Rapat ini membahas progres dan solusi untuk setiap masalah

yang timbul. Fungsi pengawasan diterapkan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan di kantor Dinas Pendidikan. Selain itu, laporan keuangan bulanan, yang mencakup pemasukan dan pengeluaran, diunggah ke situs web humas Gowa, memungkinkan publik untuk melihat laporan tersebut secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya.

4) Anggaran Dan Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi anggaran adalah dua aspek kunci dalam manajemen keuangan yang sangat mempengaruhi berbagai aspek manajemen dalam sebuah organisasi. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran ini mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran serta alokasi sumber daya untuk berbagai kegiatan atau proyek. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan atau aktualisasi dari anggaran yang telah disusun. Ini mencakup pendapatan yang benar-benar diterima dan pengeluaran yang benar-benar terjadi selama periode anggaran. Anggaran dan realisasi anggaran merupakan elemen penting dalam manajemen yang mempengaruhi hampir semua aspek operasional dan strategis organisasi. Melalui perencanaan yang tepat, distribusi sumber daya yang efektif, pengarahan yang motivatif, pengendalian yang akurat, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang terpercaya, manajemen dapat mencapai tujuan organisasional dengan lebih efisien dan efektif.

4.2 Efisiensi Belanja Daerah Daerah Priode 2022-2023

THN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI BELANJA
2022	BELANJA DAERAH	569,011,167,574	422,869,012,021	146,142,155,553
2023	BELANJA DAERAH	590,646,231,827	458,850,925,607	131,795,306,220

Sumber : SPJ Laporan keuangan dinas pendidikan kab.Gowa Diolah:2024

4.3 Hasil SILPA

No	TAHUN	SILPA
1.	2022	146,142,155,553
2.	2023	131,795,306,220

Sumber : SPJ Laporan keuangan dinas pendidikan kab.Gowa Diolah:2024

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa SILPA untuk tahun 2022 adalah 146,142,155,553 dan untuk tahun 2023 adalah 131,795,306,220. Kedua angka ini menunjukkan sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun tersebut.

Untuk menghitung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tabel di atas, kita perlu mengurangkan realisasi belanja dari anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap tahun. Berikut adalah perhitungannya:

- Tahun 2022:

Anggaran : 569,011,167,574

Realisasi : 422,869,012,021 –

SILPA 146,142,155,553

- Tahun 2023

Anggaran : 590,646,231,827

Realisasi : 458,850,925,607 -

SILPA 131,795,306,220

Pada tahun 2022, anggaran belanja daerah yang ditetapkan adalah Rp 569,011,167,574. Namun, realisasi belanja hanya mencapai Rp 422,869,012,021. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi belanja sebesar Rp 146,142,155,553. Efisiensi belanja ini juga sama dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), yaitu jumlah anggaran yang tidak terpakai.

Pada tahun 2023, anggaran belanja daerah yang ditetapkan meningkat menjadi Rp 590,646,231,827. Namun, realisasi belanja mencapai Rp 458,850,925,607. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi belanja sebesar Rp 131,795,306,220. Efisiensi belanja ini juga sama dengan SILPA.

tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terjadi efisiensi belanja daerah yang cukup besar. Penyebab utama dari adanya SILPA pada tahun-tahun tersebut adalah efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Artinya, belanja daerah yang direncanakan tidak sepenuhnya terealisasi karena pengelolaan yang lebih hemat atau karena adanya perubahan prioritas dalam pengeluaran.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, sebagai salah satu pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berhasil melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran mereka. Hal ini dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan dana cadangan atau digunakan untuk keperluan lain di masa mendatang. Namun, perlu juga diperhatikan agar efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Tabel 4.2, berikut adalah

persentase realisasi belanja dan efisiensi (SILPA) untuk tahun 2022 dan 2023:

1. Tahun 2022:

- a. Persentase realisasi belanja dari anggaran: 74,32%
- b. Persentase efisiensi (SILPA) dari anggaran: 25,68%

2. Tahun 2023:

- a. Persentase realisasi belanja dari anggaran: 77,69%
- b. Persentase efisiensi (SILPA) dari anggaran: 22,31%

Pada tahun 2022, 74,32% dari anggaran yang dialokasikan berhasil direalisasikan, sementara 25,68% sisanya merupakan efisiensi atau SILPA. Pada tahun 2023, 77,69% dari anggaran yang dialokasikan berhasil direalisasikan, dengan efisiensi atau SILPA sebesar 22,31%. Terdapat peningkatan dalam persentase realisasi belanja dari tahun 2022 ke 2023, yang menunjukkan perbaikan dalam penggunaan anggaran. Namun, masih ada porsi signifikan dari anggaran yang tidak terpakai, yaitu sekitar 22-26%, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.

C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan manajemen keuangan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah dilakukan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan mencakup pembuatan laporan keuangan fisik bulanan, triwulanan, laporan semester, dan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta perencanaan keuangan lainnya.

a) Perencanaan

Proses perencanaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mencakup berbagai tahapan yang berlandaskan dokumen strategis dan peraturan yang jelas. Menurut Pak TM, perencanaan dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahun masa kerja dan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ibu RS, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, menambahkan bahwa penyusunan Renstra setiap lima tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dinas.

Pak MN menjelaskan lebih lanjut bahwa perencanaan keuangan meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta perencanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Dinas Pendidikan menggunakan aplikasi Eksekutif Manajemen Informasi Sistem (EKMIS) dari BPKP RI. Pak TM menyatakan bahwa penerapan yang sesuai dengan Renstra dan pengelolaan yang baik akan meminimalkan SiLPA dan memastikan realisasi anggaran mencapai 100%.

b) Pencatatan Administrasi

Ibu DR, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, menegaskan bahwa pelaporan keuangan masih

menggunakan aplikasi EKMS dari BPKP, namun mulai tahun 2024, akan diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Setiap tahun, laporan pertanggungjawaban disusun menggunakan aplikasi ini untuk memastikan akuntabilitas.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa proses penganggaran, penyaluran, dan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki pengaruh signifikan terhadap tercapainya SILPA. Ibu DR memberikan contoh kasus di mana anggaran sebesar 100 juta rupiah hanya terealisasi 90 juta rupiah, sehingga terjadi selisih SILPA sebesar 10 juta rupiah. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA tersebut. Dengan adanya perencanaan yang matang melalui dokumen strategis seperti Renstra dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang tepat, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya mengurangi terjadinya SILPA. Evaluasi rutin dan penyesuaian metode pelaporan merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan anggaran dapat direalisasikan sesuai rencana dan meminimalisir sisa anggaran yang tidak terpakai.

c) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam proses pencatatan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, kerap kali muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Pak TM menjelaskan bahwa SILPA sering terjadi ketika ada kegiatan yang tidak terlaksana dalam setahun. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasubag Keuangan, Pak MN, yang menjelaskan bahwa SILPA biasanya berasal dari kegiatan yang sudah dianggarkan di awal

tahun namun pada realisasinya tidak sepenuhnya tercapai. Misalnya, ada kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dilaksanakan pada tahun berjalan, sehingga menyebabkan adanya SILPA.

Ibu RS menambahkan bahwa proses pencatatan keuangan dilakukan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Namun, meskipun prosedur pencatatan sudah sesuai, tetap ada kendala terkait kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah pencatatan administrasi dan mengurangi terjadinya SILPA, DW menyatakan bahwa evaluasi sering dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA dan mencari solusi agar hal tersebut tidak terulang di tahun berikutnya. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya terus memperbaiki sistem pencatatan keuangan dan memastikan bahwa anggaran yang telah dianggarkan dapat direalisasikan sepenuhnya. Dari wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Ketua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa tentang kompetensi sumber daya manusia, evaluasi di setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman RKA dan DPA yang telah dibuat.

Pengawasan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Menurut Pak TM, pengelolaan keuangan didasarkan pada aturan yang jelas dan komprehensif, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, hingga peraturan

daerah yang telah dibuat sendiri. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal melalui Ketua Bidang, tetapi juga oleh eksternal seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit tahunan. Sementara itu, Pak MN menambahkan bahwa untuk memastikan akuntabilitas, evaluasi dilakukan secara berkala minimal satu kali sebulan melalui rapat staf. Rapat ini membahas progres dan solusi untuk setiap masalah yang timbul. Fungsi pengawasan diterapkan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan di kantor Dinas Pendidikan. Selain itu, laporan keuangan bulanan, yang mencakup pemasukan dan pengeluaran, diunggah ke situs web humas Gowa, memungkinkan publik untuk melihat laporan tersebut secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya.

d) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) didefinisikan sebagai sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Sedangkan menurut Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, definisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode

anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.¹⁸ Adanya SILPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Dalam penyusunan APBD jumlah SILPA seharusnya adalah sebesar nol artinya penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit yang terjadi. Jika masih terdapat SILPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah. Sedangkan jika SILPA bernilai negatif maka pembiayaan neto belum dapat menutup defisit maka hal ini dapat ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SILPA menjadi nol.

Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Sehingga Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan

pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bali (2013) menyebutkan bahwa beberapa faktor keberadaan SILPA diduga karena terjadinya kelebihan pendapatan yang tidak terhitung pada realisasi anggaran dan rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang terindikasi terlibat dalam pembentukan SILPA adalah adanya penghematan belanja karena program pemerintah yang tidak terlaksana yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran pemerintah. Selain itu keberadaan SILPA juga menjadi dilema bagi pengelolaan keuangan daerah karena besarnya SILPA bisa mengindikasikan hal yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, SILPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SILPA merupakan dana menganggur (idle fund), apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

Ada beberapa alasan yang mendukung penilaian bahwa kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dapat dikaitkan baik, meskipun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berikut adalah alasan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dikatakan baik :

1. Komitmen Kuat Dalam Manajemen Keuangan
 - a) Penyusunan dokumen strategi seperti Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap lima tahun menunjukkan perencanaan yang matang dan komprehensif.
 - b) Perencanaan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memastikan konsistensi

dengan visi dan misi daerah.

2. Penggunaan Teknologi Untuk Efisiensi

- a) Penggunaan aplikasi EKMIS dari BPKP RI membantu meminimalkan SILPA dan memastikan realisasi anggaran yang baik.
- b) Rencana untuk beralih ke SIPD RI mulai tahun 2024 menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan keuangan.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

- a) Pencatatan administrasi yang menggunakan aplikasi EKMIS menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi.
- b) Evaluasi rutin untuk mengidentifikasi penyebab SILPA dan mencari solusi memperlihatkan pendekatan proaktif dalam perbaikan sistem.

4. Pengembangan Kompetensi SDM

- a) Pelatihan dan evaluasi rutin untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia menunjukkan upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman.
- b) Pengawasan ketat oleh inspektorat dan BPK serta transparansi pelaporan menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas.

5. Pendekatan Proaktif terhadap SILPA

Mengelola SILPA dengan dua pendekatan, yaitu memanfaatkan dana yang berlebihan untuk kegiatan pembangunan di tahun berikutnya dan menganggarkan kembali jika ada kekurangan, menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan

penggunaan anggaran yang efisien dan berkelanjutan.

Dinas pendidikan kabupaten gowa dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam manajemen keuangan karena :

- a) Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang komprehensif dan strategis.
- b) Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan.
- c) Komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi.
- d) Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- e) Pendekatan yang adaptif dan proaktif dalam mengelola SILPA untuk mendukung kegiatan pembangunan di sektor pendidikan.

Kehadiran SILPA dalam konteks ini tidak semata-mata menunjukkan ketidakmampuan dalam penyerapan anggaran, melainkan refleksi dari perencanaan keuangan yang hati-hati dan strategi pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yaitu :

1. Pada tahun 2022 dan 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam pengelolaan anggaran. Ini dibuktikan dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar, yaitu Rp 146,142,155,553 untuk tahun 2022 dan Rp 131,795,306,220 untuk tahun 2023. Efisiensi ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan berhasil mengelola anggaran dengan hemat, tanpa menghabiskan seluruh dana yang dialokasikan.

Alasan mengapa adanya SiLPA ini dapat dianggap sebagai indikasi pengelolaan anggaran yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Pendidikan mampu merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan dengan biaya yang lebih rendah daripada yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif.
- b. Peningkatan Dana Cadangan Dengan adanya sisa anggaran yang signifikan, dana ini dapat digunakan sebagai cadangan untuk kebutuhan mendesak di masa mendatang atau untuk mendanai proyek-proyek prioritas lainnya yang mungkin muncul.
- c. Fleksibilitas Penggunaan Dana Sisa anggaran dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang mendesak atau penting, memberikan

fleksibilitas bagi Dinas Pendidikan dalam merespon kebutuhan yang mungkin tidak terduga pada awal tahun anggaran.

- d. Indikasi Pengelolaan Keuangan yang Baik. Adanya SiLPA yang besar tanpa mengorbankan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan mampu mengelola keuangan dengan baik, memastikan bahwa dana digunakan dengan bijaksana dan tidak terjadi pemborosan.

Meskipun demikian, optimalisasi penggunaan anggaran tetap diperlukan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

2. Pencatatan Administrasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menggunakan aplikasi EKMS untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan administrasi keuangan, dan akan beralih ke SIPD RI mulai tahun 2024 untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab SiLPA dan mencari solusi guna memperbaiki sistem pencatatan keuangan serta meminimalkan sisa anggaran yang tidak terpakai.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi rutin, memastikan pengelolaan keuangan sesuai pedoman RKA dan DPA. Pengawasan ketat oleh Inspektorat dan BPK serta transparansi pelaporan menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas. Evaluasi berkala dan rapat staf membantu memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai rencana.

2. Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Disarankan agar mampu memahami dan menerapkan ilmu manajemen keuangan dengan sebaik-baiknya agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keuangan di Kantor dinas pendidikankabupaten gowa.
2. Kantor Dinas pendidikan Kabupaten Gowa agar lebih memperhatikan lagi pengelolaan keuangannya terutama pada bagian perencanaan agar keuangan Dinas pendidikan Kabupaten Gowa tetap membaik.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menambah ilmu pengetahuan secara umum mengenai manajemen keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S & Asmara, J.A. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: bukti empiris atas aplikasi agency theory di sektor publik. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bali, Thomas Tuba. 2013. Analisis faktor-faktor Penyebab Terjadinya SILPA Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Chandrarin, G. (2017). Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan Ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gie, The Liang 1980. “ *Dasar-Dasar Administrasi, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah* ” Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kamelia, Mely. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dan Strategi Untuk Meminimalisir Pada Apbd Kabupaten Bogor. Thesis, Institut Pertanian Bogor.
- Krenn, C. 2017. The European Court of Justice’s Financial Accountability. *European Constitutional Law Review*, 13(3), 453-474.
- Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga: Jakarta
- Mardiosmo. 2012. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Nawawi, H, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempat, Penerbit Gajah Mada University, Press Yogyakarta.
- Priyatno, Dwi. 2011. *Analisis Statistik Dengan Microsoff Excell Dan SPSS*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Rahmawati, A. (2015). Analisis Terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Sebelum dan Setelah Reformasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.

- Rindawati, S., & Marjoyo. (2017). *Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Sosiohumaniora, 19(2), 120-127.*
- Sudarmanto, R Gunawan. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 19.* Mitra Wancana Media : Bandarlampung.
- Sugiono, S. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225, 87.*
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.* Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Virgasari, Aviva (2009). *Hubungan Antara Opini Auditor Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah.* Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Widarjono, A. (2018). *Estimating profitability of Islamic banking in Indonesia.* *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(3), 568-579.*



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Taufiq Mursad, ST	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
2.	Hj. Rike Susanti, ST	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
3.	Muh. Nur Yadin, H, S.ST, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
4.	Dewi Rahmawaty, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara itu adalah sebagai berikut:

1. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) ini sering terjadi di setiap tahun, dampaknya bagi Dinas Pendidikan seperti apa?

Jawaban : Untuk SILPA ini memang terjadi setiap tahun, dampaknya itu ada dampak baik dan ada juga dampak buruk. Dampak baiknya itu bahwa anggaran yang realisasi itu, misalkan silpanya kurang berarti anggaran realisasi itu baik sedangkan anggarannya melebihi tahun itu juga berdampak buruk karena penyelenggaraan anggaran terlihat minim.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya SILPA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa?

Jawaban : Faktor terjadinya SILPA itu biasa berasal dari kegiatan yang sudah dianggarkan diawal tahun namun pada realisasinya tidak seratus persen tercapai. Misalkan adanya kegiatan yang sudah direncanakan tapi ditahun berjalan tidak dilaksanakan dan itulah terjadinya SILPA.

3. Bagaimana sistem perencanaan anggaran yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa? Apakah sistem tersebut berpengaruh terhadap besarnya SILPA?

Jawaban : Sistem yang diterapkan sebenarnya sama semua dalam satu sistem kabupaten penerapannya itu juga sama, yang penting kegiatan berlangsung SILPA juga akan minim dan seratus persen akan realisasi.

4. Bagaimana proses penganggaran, penyaluran, dan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa? Apakah proses-proses tersebut berpengaruh terhadap tercapainya SILPA?

Jawaban : Kasusnya pasti berpengaruh karena mulai dari penganggaran, belum juga satu penganggarannya 100 juta pada saat pelaksanaan cuman tercapai 90 juta itu adanya selisih SILPA 10 juta dan disitulah biasanya dievaluasi apa penyebab terjadinya SILPA sebagai 10 juta itu.

5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap besarnya SILPA di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa?

Jawaban : Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh lebih karena masing-masing itu sudah ada anggarannya dan pemanfaatan teknologi itu berdasarkan kegiatan apa yang berlangsung.

6. Bagaimana sistem pengawasan internal maupun eksternal di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa? Apakah pengawasan berpengaruh dalam pencapaian SILPA?

Jawaban : Masalah pengawasan itu kita lakukan setiap bulan, mulai dari verifikasi laporan sampai dengan perencanaan kegiatan. Walaupun ada kegiatan yang tidak berlangsung itu akan diminta keterangan dari PPTK nya dan alasannya apa sehingga tidak terjadi atau tidak terlaksana kegiatannya dan itu berpengaruh terhadap SILPA.



Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian Dan Surat Balasan
(surat permohonan penelitian LP3M)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Nomor : 247/05/A.2-II/III/45/2024 Makassar, 27 Maret 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : SASKIA

Stambuk : 105721104620

Jurusan : Manajemen

Judul Penelitian : PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DALAM ASPEK
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
sesuai tempat mahasiswa tersebut malakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.

Dekan.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.0866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4163/05/C.4-VIII/IV/1445/2024 30 April 2024 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 21 Syawal 1445
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 247/05/A.2-II/IV/45/2024 tanggal 27 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SASKIA
No. Stambuk : 10572 1104620
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Manajemen
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Faktor-Faktor dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Pemerintahan Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Mei 2024 s/d 2 Juli 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

D. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

(Surat Permohonan Penelitian DPM dan PTSP GOWA)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 10281/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4136/05/C.4-VIII/IV/1445./2024 tanggal 30 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SASKIA
Nomor Pokok : 105721104620
Program Studi : Manajemen
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DALAM ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 April s/d 30 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

(Surat Balasan Dari Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa)



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jl. Tumanurung Raya No.B10 pandang-pandang, Kode Pos 92114 Sungguminasa

IZIN PENELITIAN

Nomor : 800/2556/DISDIK

Dasar : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nomor : 503/433/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2024 Tanggal, 2 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Penelitian, maka kepala Dinas Pendidikan Kab.Gowa

MENGIZINKAN

Kepada :Nama : SASKIA
Tempat/Tgl Lahir : Limbung / 23 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105721104620
Program Studi : Manajemen
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Timpopo

Untuk : Mengadakan Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam rangka penyusunan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Judul Penelitian : **“Pengaruh Faktor-Faktor dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah terhadap sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa”**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus melapor pada Kepala Dinas yang bersangkutan
2. Tidak Mengganggu proses kegiatan di Lokasi Penelitian
3. Harus mematuhi tata tertib dan peraturan di Sekolah yang berlaku
4. Hasil penelitian 1 (satu) exampplar dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Gowa.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 16 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 197207011998031008

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Pertinggal

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *‘Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.’*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code




Lampiran 3 Dokumentasi Dan Foto





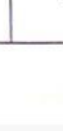


Lampiran 4 Hasil Validasi Data



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
AKULTASEKONOMIDAN BISNIS
PUSATVALIDASIDATA
Jl.SultanAlauddin259Makassar,GedungIqraIt.8|e-mail:pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMAMAHASISWA		SASKIA		
NIM		105721104620		
PROGRAMSTUDI		MANAJEMEN		
JUDULSKRIPSI		PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DALAM ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA		
NAMAPEMBIMBING1		Drs. H. Sultan Sarda, M.M.		
NAMAPEMBIMBING2		Masrullah, SE., M. Ak.		
NAMAVALIDATOR		Dr. Muhammad Nur Abdi, S.E., M.M		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	UraianPerbaikan/saran	Paraf*
1	Pedomanwawancara/observasi/catatanlapangan/ataupedomanlainnya		SdhapatACC	
2	Hasil verbatim dan codingwawancara/observasi/catatanlapangan/ataupedomanlainnya		SdhapatACC	
3	HasilUjiKeabsahanData		SdhapatACC	
4	Hasildeskripsipenelitian		SdhapatACC	
5	Dokumentasi penelitian(rekamanwawancara/foto/dokumentasilainnya)		SdhapatACC	
6	Hasilanalisis		SdhapatACC	

*Harapvalidatormemberiparafketikakoreksitelahdisetujui

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Saskia

Nim : 10572104620

Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	0 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juni 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

SASKIA 105721104620 Bab I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS



turnitin

PRIMARY SOURCES

- 1 Dasep Suryanto. "Pengaruh Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2019
Publication 3%
- 2 Submitted to Sriwijaya University
Student Paper 2%
- 3 Submitted to Universitas Muria Kudus
Student Paper 2%
- 4 Submitted to Universitas Bengkulu
Student Paper 2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

SASKIA 105721104620 Bab II

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX 0% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATION 0% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



SASKIA 105721104620 Bab III

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX **0%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **5%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Submitted to Universitas Bengkulu
Student Paper | 3% |
| 2 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | 1% |
| 3 | Submitted to Santa Barbara City College
Student Paper | 1% |



Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



SASKIA 105721104620 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX
5% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.nobel.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia Student Paper	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

SASKIA 105721104620 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Lampiran 6 Hasil Validasi Abstrak



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA		SASKIA		
NIM		105721104620		
PROGRAM STUDI		MANAJEMEN		
JUDUL SKRIPSI		FAKTOR-FAKTOR DALAM ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA		
NAMA PEMBIMBING 1		DRS. H. SULTAN SARDA, MM		
NAMA PEMBIMBING 2		MASRULLAH, S.E., M.Ak		
NAMA VALIDATOR		AULIA, S.IP., M.Si., M		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	27/6 - 2024	Abstrak tidak sesuai dengan buku pedoman Gunakan Gramerli	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

BIOGRAFI PENULIS



Saskia panggilan Kiya lahir di Limbung pada tanggal 23 Juni 2003 dari pasangan suami istri Bapak Baharuddin dan Ibu Rosmiati. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Limbung Kecamatan

Bajeng Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Kalebajeng lulus tahun 2014, SMP Muhammadiyah Limbung lulus tahun 2017, SMK Negeri 1 Gowa lulus tahun 2020, dan mulai tahun 2020 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.